



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**DINAS PERHUBUNGAN**

JL. R.A Kartini No. 35 Palu, Kode Pos 94112

Telepon : (0451) 422196, Fax : (0451) 423039

Email : [dishub@sultengprov.go.id](mailto:dishub@sultengprov.go.id), Website: <https://perhubungan.sultengprov.go.id/>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR: 300.2.11/36/dishub**

**TENTANG**  
**DAFTAR INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

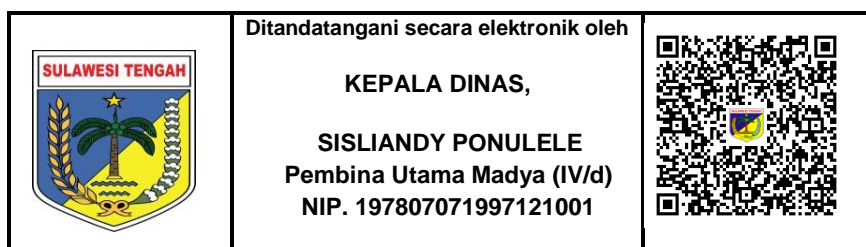
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang Mengamanatkan perlunya Badan Publik Wajib menyediakan, memberikan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangan kepada pemohon Informasi Publik, selain informasi dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar Informasi Publik.
- c. Sesuai Pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik sesuai klasifikasi sebagai tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dan harus dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 3 Juni 2026



### Tembusan:



1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 TAHUN 2026

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBAUT ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBAUT INFORMASI	BENTUK INFORMASI TERSEDIA			JANGKA PENYIMPANAN / JADWAL RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI
					DOKUMEN	FILE	ONLINE		
1	IKU	Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	Selama Berlaku Perda/Pergub	
2	Rencana Strategi (RENSTRA)	Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	Selama Berlaku Perda/Pergub	
3	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	1 Tahun	
4	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	1 Tahun	
5	Rencana Kerja (RENJA)	Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	1 Tahun	
6	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	1 Tahun	
7	Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	1 Tahun	
8	Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA)	Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	1 Tahun	
9	Fasilitas Keselamatan Jalan	Seksi Prasarana Lalu Lintas	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Sesuai Kebutuhan Jalan provinsi	Ada	Ada	Tidak ada	5 Tahun	
10	Data Lokasi Penempatan Fasilitas Keselamatan Jalan	Seksi Prasarana Lalu Lintas	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Sesuai Kebutuhan Jalan provinsi	Ada	Ada	Tidak ada	5 Tahun	
11	Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Kabid LLJ	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Sesuai Kebutuhan Jalan provinsi	Ada	Ada	Tidak ada	5 Tahun	
12	Pengaturan Lalu Lintas Jalan	Kabid LLJ	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Sesuai Kebutuhan Jalan provinsi	Ada	Ada	Tidak ada	Sesuai Kebutuhan	
13	Penghapusan Kendaraan	Kabid LLJ	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Setiap ada Permintaan	Ada	Ada	Tidak ada	Selalu Ada	
14	Ramp Check	Kabid LLJ	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Tiap Tahun	Ada	Ada	Tidak ada	Selalu Ada	
15	Kartu Pengawas Angkutan Orang	Seksi Angkutan Jalan dan Terminal	Kepala Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian	2026, Palu	Ada	Ada	Tidak ada	Selama Berlaku Kartu Pengawasan Angkutan Orang dan Berlaku Selama 6 Bulan	

16	Perubahan Status Kendaraan Bermotor : -Dari kendaraan Baru Menjadi Plat Nomor Kuning -Dari Plat Nomor Hitam Menjadi Plat Nomor Kuning	Seksi Angkutan Jalan dan Terminal	Kepala Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian	2026, Palu	Ada	Ada	Tidak ada	Selama Status Kendaraan Bermotor Aktif dan Berlaku Selamanya	
17	Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Penerbitan Izin Trayek AKDP dan AJDP	Seksi Angkutan Jalan dan Terminal	Kepala Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian	2026, Palu	Ada	Ada	Tidak ada	Selama Izin Trayek diterbitkan dan berlaku selama 5 tahun	
18	Kampanye Keselamatan Jalan	Seksi Keselamatan Jalan	Kepala Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian	2025, Palu	Ada	Ada	Tidak ada	Selama 1 Tahun	
19	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Seksi Keselamatan Jalan	Kepala Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian	2025, Palu	Ada	Ada	Tidak ada	Selama 1 Tahun	
20	Pemilihan Abdi Jasa Teladan	Seksi Keselamatan Jalan	Kepala Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian	2025, Palu	Ada	Ada	Tidak ada	Selama 1 Tahun	
21	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B	Kepala Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian	Kepala Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian	2024	Ada	Ada	Tidak ada	Selama 1 Tahun	
22	Laporan Bulanan PAD	Tata Usaha	Kepala UPT. P3	2026	Ada	Ada	Tidak ada	Selama 1 Tahun	
23	RKA UPT	Tata Usaha	Kepala UPT. P3	2026	Ada	Ada	Tidak ada	Selama 1 Tahun	
24	DPA UPT	Tata Usaha	Kepala UPT. P3	2026	Ada	Ada	Tidak ada	Selama 1 Tahun	
25	DUK	Tata Usaha	Kepala UPT. P3	2026	Ada	Ada	Tidak ada	Selama 1 Tahun	
26	Struktur Organisasi/ Daftar Jabatan Fungsional Pelaksana	Tata Usaha	Kepala UPT. P3	2026	Ada	Ada	Tidak ada	Selama Berlaku Jabatan	
27	Data OPS Pelabuhan	Seksi Pengelolaan Pelabuhan	Kepala UPT. P3	2026	Ada	Ada	Tidak ada	Berlaku 1 (satu) kali penerbitan selama perusahaan beroperasi	
28	Data OPS Terminal	Seksi Pengelolaan Terminal	Kepala UPT. P3	2026	Ada	Ada	Tidak ada	Berlaku 1 (satu) kali penerbitan selama perusahaan beroperasi	
29	SOP Perizinan Perusahaan Pelayaran Laut	Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut	Kepala Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP	2026	Ada	Ada	Ada	Berlaku 1 (satu) kali selama beroperasi dengan melakukan pemuktahiran dokumen per 2 (dua) tahun sekali	
30	SOP Perizinan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi	Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut	Kepala Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP	2026	Ada	Ada	Ada	Berlaku 1 (satu) kali selama beroperasi dengan melakukan pemuktahiran dokumen per 2 (dua) tahun sekali	

31	SOP Perizinan Perusahaan Angkutan Laut	Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut	Kepala Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP	2026	Ada	Ada	Ada	Berlaku 1 (satu) kali selama beroperasi dengan melakukan pemuktahiran dokumen per 2 (dua) tahun sekali
32	SOP Perizinan Perusahaan Bongkar Muat	Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut	Kepala Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP	2026	Ada	Ada	Ada	Berlaku 1 (satu) kali selama beroperasi dengan melakukan pemuktahiran dokumen per 2 (dua) tahun sekali
33	Sertifikasi Standar Teknis Perusahaan Angkutan Laut	Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut	Kepala Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP	2026	Ada	Ada	Ada	Berlaku 1 (satu) kali selama beroperasi dengan melakukan pemuktahiran dokumen per 2 (dua) tahun sekali
34	Perusulan Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis	Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut	Kepala Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP	2026	Ada	Ada	Tidak ada	Berlaku 1 (satu) kali penerbitan selama perusahaan beroperasi
35	Tarif Angkutan Penyebrangan antar Kabupaten	Kepala Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP	Kepala Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP	2026	Ada	Ada	Ada	Selama berlaku Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur
36	Daftar Pelabuhan Penyebrangan di Sulawesi Tengah	Kepala Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP	Kepala Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP	2026	Ada	Ada	Ada	Selama berlaku Peraturan Menteri

	Ditandatangani secara elektronik oleh	
<b>KEPALA DINAS,</b> <b>SISLIANDY PONULELE</b> <b>Pembina Utama Madya (IV/d)</b> <b>NIP. 197807071997121001</b>		



**DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA  
 TAHUN 2026**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN	PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUAT	BENTUK INFORMASI TERSEDIA			JANGKA PENYIMPANAN / JADWAL RETENSI ARSIP
					DOKUMEN	FILE	ONLINE	
1	IKU	Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	Selama Berlaku Perda/Pergub
2	Rencana Strategi (RENSTRA)	Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	Selama Berlaku Perda/Pergub
3	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	1 Tahun
4	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	1 Tahun
5	Rencana Kerja (RENJA)	Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	1 Tahun
6	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	1 Tahun
7	Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	1 Tahun
8	Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA)	Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	1 Tahun
9	Struktur Organisasi	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	Selama Berlaku Perda/Pergub
10	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	6 Bulan
11	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Ada	1 Tahun
12	Daftar Pejabat	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Tidak ada	Selama Berlaku SK Gubernur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13	Daftar Riwayat Hidup ASN	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Tidak ada	Berlaku sesuai priode update riwayat kepegawaian
14	Daftar Usul Proses Administrasi Kepegawaian ASN	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Tidak ada	1 Tahun atau sesuai kebutuhan
15	Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPTH)	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Tidak ada	1 Tahun
16	Dokumen Data Aset	Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2026	Ada	Ada	Tidak ada	1 Tahun
17	Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya	Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Tidak ada	Berubah sesuai kebutuhan
18	Ramp Check	Kabid LLJ	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Tiap Tahun	Ada	Ada	Tidak ada	Selalu Ada
19	Kartu Pengawas Angkutan Orang	Seksi Angkutan Jalan dan Terminal	Kepala Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian	2026, Palu	Ada	Ada	Tidak ada	Selalu Ada
20	Rekomendasi/Pertimbangan Teknis penerbitan izin Trayek AKDP dan AJDP	Seksi Angkutan Jalan dan Terminal	Kepala Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian	2026, Palu	Ada	Ada	Tidak ada	Selama Izin Trayek diterbitkan dan berlaku selama 5 tahun
21	Kampanye Keselamatan Jalan	Seksi Keselamatan Jalan	Kepala Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian	2026, Palu	Ada	Ada	Tidak ada	Selama 1 Tahun
22	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Seksi Keselamatan Jalan	Kepala Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian	2026, Palu	Ada	Ada	Tidak ada	Selama 1 Tahun
23	Pemilihan Abdi Jasa Teladan	Seksi Keselamatan Jalan	Kepala Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian	2026, Palu	Ada	Ada	Tidak ada	Selama 1 Tahun
24	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B	Kabid Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian	Kepala Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian	2026, Palu	Ada	Ada	Tidak ada	Selama 1 Tahun
25	Laporan Bulanan PAD	TU	Kepala UPT. P3	2026, Palu	Ada	Ada	Tidak ada	Selama 1 Tahun

26	RKA UPT	TU	Kepala UPT. P3	2026, Palu	Ada	Ada	Tidak ada	Selama 1 Tahun
27	DUK	TU	Kepala UPT. P3	2026, Palu	Ada	Ada	Tidak ada	Selama 1 Tahun
28	Struktur Organisasi/Daftar Jabatan Fungsional Pelaksana	TU	Kepala UPT. P3	2026, Palu	Ada	Ada	Tidak ada	Selama Berlaku Jabatan
29	Data OPS Pelabuhan	Seksi Pengelolaan Pelabuhan	Kepala UPT. P3	2026, Palu	Ada	Ada	Tidak ada	1 Tahun
30	Data OPS Terminal	Seksi Pengelolaan Terminal	Kepala UPT. P3	2026, Palu	Ada	Ada	Tidak ada	1 Tahun

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh</p> <p><b>KEPALA DINAS,</b></p> <p><b>SISLIANDY PONULELE</b>  <b>Pembina Utama Madya (IV/d)</b>  <b>NIP. 197807071997121001</b></p>	
---	--	---

LAMPIRAN III



KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

NOMOR : 300 2 11/36/dishub

TANGGAL : 3 Juni 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
YANG DIUMUMKAN SERTA MERTA  
TAHUN 2026

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUAT INFORMASI	BENTUK INFORMASI TERSEDIA			JANGKA PENYIMPANAN / JADWAL RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI
					DOKUMEN	FILE	ONLINE		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh</p> <p><b>KEPALA DINAS,</b></p> <p><b>SISLIANDY PONULELE</b> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 197807071997121001</p>	
---	--	---

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 YANG DIKECUALIKAN  
 TAHUN 2026**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen Kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik dokumen individu ASN)/DUK	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan menghindari penyalahgunaan data pribadi	Melindungi data dan informasi seorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap ASN yang bersangkutan
2	Daftar Usulan Mutasi Jabatan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis
3	Laporan Pengusulan Cerai ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Desposisi Surat Pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis
5	Nota Dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (i)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis
6	Usulan Penjatuhan Sanksi disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis
8	Surat Penawaran Harga pada Dokumen pemenang lelang	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis
9	Dokumen penawaran pengadaan (yang memuat data pribadi atau dokumen lainnya yang dilindungi)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (i)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis
10	Dokumen Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (j)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis

11	Neraca Keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (j)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis
12	Data Induk Perusahaan Angkutan Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (j)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis
13	Data Induk Perusahaan Bongkar Muat Pengurusan Transportasi Angkutan Laut	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (j)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis
14	Data Induk Perusahaan Pemohon Andalalin	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (j)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis

